

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGANGKATAN  
ANAK OLEH ORANG YANG BELUM PERNAH MENIKAH  
DALAM PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN  
PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA**

**SKRIPSI**

Oleh

**NILNA AULA RIZQI**

**NIM: C91215146**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**

**Fakultas Syariah Dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam**

**Surabaya**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nilna Aula Rizqi  
NIM : C91215146  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/  
Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Pengangkatan  
Anak Oleh Orang Yang Belum Pernah Menikah  
Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah  
Nomor 2 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan  
Pembangunan Ketahanan Keluarga

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 01 Juli 2019

Saya yang menyatakan,



Nilna Aula Rizqi

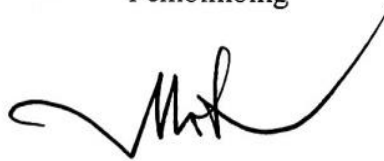
NIM. C91215146

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGANGKATAN ANAK DALAM PASAL 22 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA” yang di tulis oleh Nilna Aula Rizqi NIM. C91215146 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 27 Juni 2019

Pembimbing



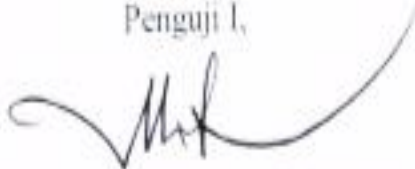
Dr. H. Masruhan, M.Ag.  
NIP. 195904041988031003

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nilna Aula Rizqi NIM. C91215146 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa 23 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



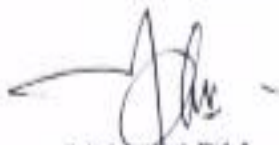
Dr. H. Masruhan, M.Ag.  
NIP. 195904041988031003

Penguji II,



Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag.  
NIP. 197110212001121002

Penguji III,



Mahir, M.Ed.  
NIP. 197212042007011027

Penguji IV,



Ikhsan Fatah Yasin, S.HI, M.H.  
NIP. 198905172015031006

Surabaya, 30 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.  
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nilna Aula Rizqi  
NIM : C91215146  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam  
E-mail address : [nilnaaularizqi66@gmail.com](mailto:nilnaaularizqi66@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG  
YANG BELUM PERNAH MENIKAH DALAM PERATURAN DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN  
PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 05 Agustus 2019

Penulis

(Nilna Aula Rizqi)













Untuk mencapai tujuan dari pernikahan perlu adanya pelengkap yang harus terpenuhi salah satunya adalah adanya kehadiran anak. Setiap pasangan suami istri tentu ingin mempunyai anak dalam hubungan rumah tangganya. Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah Swt. bahkan anak itu dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda ataupun yang lainnya. Anak sebagai amanah yang diberikan Allah Swt. yang harus dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak manusia yang harus dijunjung tinggi. Betapa pentingnya kehadiran anak dalam sebuah rumah tangga sehingga terdapat pandangan dalam masyarakat bahwa tanpa adanya anak, perkawinan yang telah berlangsung akan hampa karena tidak terwujudnya suatu keutuhan dalam keluarga yang didambakan.

Namun keinginan itu terkadang tidak sejalan dengan kehendak Allah Swt. yang pada akhirnya Allah menguji rumah tangganya dengan ketidakhadiran seorang anak. Hal ini dapat memicu ketidak harmonisan rumah tangga. Namun sebagian suami dan istri tetap berusaha dan tidak menyerah untuk mendapatkan anak, salah satunya dengan mengadopsi atau mengangkat anak. Pada zaman dahulu orang Indonesia dalam pengangkatan anak lebih suka dengan kerabat atau keluarga sendiri, karena memudahkan kesepakatan dan juga menjalin silaturahmi yang lebih kuat. Ada juga yang mengambil anak dari rumah sakit, panti asuhan dan juga anak-anak terlantar lainnya. Bahkan fenomena terbaru juga ada

















































Bab ketiga adalah hasil penelitian yang telah dilakukan. Bab ini berisi latar belakang pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018, dan pengangkatan anak oleh orang yang belum pernah menikah dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018.

Bab keempat adalah analisis hasil penelitian. Bab ini berisi tentang analisis relevansi hak pengangkatan anak bagi orang yang telah, belum atau tidak menikah dalam pasal 22 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 dalam hukum Islam.

Bab kelima adalah penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, jawaban singkat dari pokok masalah dan saran-saran serta penutup.



















memperoleh jaminan kepatian hukum hanya didapat setelah memperoleh putusan Pengadilan. Pengadilan Negeri ataupun pengadilan Agama dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukannya antara lain perkara pengesahan atau pengangkatan anak. Dengan demikian ada beberapa peraturan hukum yang dapat dijadikan rujukan bagi hakim dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman tentang pengangkatan anak, antara lain:

1. Staatblad 1917 Nomor 129, Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 mengatur masalah adopsi yang merupakan kelengkapan dari KUHPerdara/BW yang ada, dan khusus berlaku bagi golongan masyarakat keturunan Tionghoa.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tentang pengangkatan anak yang mengatur prosedur hukum mengajukan permohonan pengesahan dan/atau permohonan pengangkatan anak, memeriksa dan mengadilinya oleh pengadilan.
3. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979.
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak.
5. BAB VIII, Bagian Kedua dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak, setelah terjadinya bencana alam gempa bumi dan gelombang Tsunami yang melanda Aceh dan Nias, hal tersebut menimbulkan masalah sosial berupa banyaknya anak-anak yang kehilangan orang tuanya dan adanya keinginan sukarelawan asing untuk mengangkatnya sebagai anak angkat oleh LSM dan Badan Sosial Keagamaan lainnya yang sangat membahayakan akidah agama anak tersebut.
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 1989 tentang Peradilan Agama. Pada pasal 49 huruf a, angka 20 menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan



















































2. Undang-Undang No. 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 2015, dan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
4. Landasan yuridis yang berkenaan dengan materi muatan Peraturan Daerah ini adalah materi muatan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 8 Tahun 2015.

Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Bertujuan untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang berkaitan, untuk menjamin kepastian hukum, kesejahteraan dan rasa keadilan dalam masyarakat. Rancangan Peraturan Daerah ini dibentuk berdasarkan dengan substansi dari peraturan yang telah diatur sehingga perlu adanya Peraturan Perundang-undangan terbaru yang membahas tentang substansi tersebut. Dalam hal ini pembangunan Ketahanan keluarga telah diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera yang kemudian



















kepadanya, sehingga pengangkatan anak bertujuan untuk anak tersebut supaya mendapatkan pendidikan yang layak.

Dengan ini penulis berpendapat bahwa pengangkatan anak bagi morang yang belum menikah diperbolehkan dengan bertujuan untuk kepentingan anak dan orang tua angkat tersebut wajib membesarkan, memelihara, merawat mendidik, mengarahkan dan membimbing serta melakukan perlindungan sesuai usia, fisik dan psikis anak berdasarkan norma agama, sosial, budaya hal ini terdapat pada pasal 22 ayat 2 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 tahun 2018. Dalam peraturan tersebut menyatakan juga bahwa pengangkatan anak harus sesuai dengan norma agama, sosial dan budaya. Melihat ketentuan tersebut dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Anak menyatakan bahwa anak belum berusia 6 tahun itu merupakan prioritas utama lebih dari itu ada beberapa pertimbangan untuk di jadikan anak angkat. Kemudian selanjutnya untuk orang tua angkat harus seagama dengan anak angkat tersebut. Terkait umur orang tua angkat juga terdapat batasan yaitu minimal 30 tahun dan maksimal 55 tahun.

Terkait prosedur pengangkatan anak untuk orang yang belum menikah sama seperti pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Proses pengangkatan anak tersebut dilakukan melalui Pengadilan Agama setempat bagi warga negara yang beragama Islam yang meliputi: Permohonan dimaksud diajukan kepada Pengadilan Agama







Hukum Islam telah menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas, dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. Akibat yuridis dari pengangkatan anak atau adopsi dalam Islam hanyalah tercipta hubungan kasih dan sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai manusia. Seorang muslim boleh mengangkat anak baik anak laki-laki atau perempuan meskipun belum pernah menikah, akan tetapi karena tidak ada hubungan nasab maka konsekuensi yuridis lainnya adalah antara orang tua dengan anak angkat harus menjaga mahram, dan karena tidak ada hubungan nasab maka keduanya dapat melangsungkan perkawinan. Orang yang akan mengangkat anak harus seagama dengan anak angkat tersebut, dikhawatirkan akan merusak masa depan anak. Dalam undang-undang perlindungan anak menyebutkan bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan anak angkat. Setain itu juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 juga menyebutkan calon orang tua angkat harus seagama dengan anak yang diangkat. Prinsip utama dalam pengangkatan anak adalah calon orang tua angkat harus sama agamanya dengan calon anak angkat bertujuan untuk menghindarkan dari isu-isu pemaksaan agama. Karena nantinya mungkin menimbulkan beberapa masalah baru jika tidak seagama.





1. Hendaknya orang yang akan melakukan pengangkatan anak khususnya orang yang belum pernah menikah harus mempertimbangkan dengan matang alasan untuk mengangkat anak. Karena pada dasarnya anak butuh kasih sayang yang utuh dari orang tua nya (Ayah dan ibu), apabila mengangkat anak seorang diri dikhawatirkan mental anak tersebut terganggu. Dan juga di pertimbangkan lagi masalah biaya kehidupan kedepanya apakah ia mampu untuk memberikan nafkah kepada anak angkat tersebut.
2. Untuk lembaga pemerintahan lebih intensif melakukan sosialisasi terhadap perubahan undang-undang yang berlaku di negeri ini agar pemahaman masyarakat terhadap undang-undang yang berlaku.



- Mitra Suprayudi, "Analisis Hukum Terhadap Tabanni (Pengangkatan Anak) Menurut Fikih Islam dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak"
- Musthofa. 2008. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Noor Laili, Yunita. 2016. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak Yang Tidak Diketahui Orang Tuanya (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Jepara Nomor 0071/Pdt.P/2011/PA.Jpr)*. Yogyakarta, Skripsi-UIN Sunan Kalijaga.
- Pandika, Rusli. 2012. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Penganngkatan Anak
- Rumilawati Windari, *Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undang di Indonesia dan Beijing Rule*, <http://rusmilawati.wordpress.com/2010>, Diakses 28 Juli 2019
- Sari, Yunita. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Secara Illegal Menurut Hukum Islam*. Makasar: Skripsi-UIN Alauddin Makasar.
- Setyo Puji, Agung. *Pengangkatan Anak Oleh Wanita Yang Belum Menikah dalam Penetapan No. 0092/Pdt.P/2009/PA Situbondo* (Skripsi-IAIN Sunan Ampel, Surabaya 2012).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawal Pers.
- Soeroso, R. 1992. *Perbandingan Hukum Perdata*. Bandung: Sinar Grafika.
- Soetodjo, Wagiaty. 2006. *Hukum Pidana Anak* (Jakarta: Refika Adiatama).
- Syamsu Alam, Andi. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif islam*. Jakarta: Kencana Predana Media Grup.
- Triwulan Tutik, Titik. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum* (Surabaya: Prestasi Pustakaraya)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

